

**PENGUMUMAN**  
**LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN**  
**TENAGA AHLI DATA SPECIALIST**  
**SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**GRANT NO. TFC1687/TFC3114**

---

**No. 04/UKPBJ.ST.36/06.05/09/2024**

---

Dalam rangka pelaksanaan dukungan kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* yang didanai oleh grant No. **TFC1687/TFC3114**, dibutuhkan segera tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut :

**1. Tenaga Ahli Data Specialist Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting**  
**Kementerian PPN/Bappenas (1 orang)**  
**kode : DS**

Kualifikasi :

- a. Latar belakang pendidikan diutamakan **sarjana (S1) diutamakan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, kebijakan, sosial, ekonomi, statistik, ilmu komputer, dan manajemen.**
- b. Persyaratan kualifikasi teknis untuk **Penyedia Jasa Lainnya**, meliputi:
  - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
  - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
- c. Memiliki pengalaman dalam menganalisis indikator program minimal 5 tahun dan dibuktikan dengan referensi pekerjaan.
- d. Memiliki pengalaman dalam penyusunan metadata program minimal 1 kali dalam 5 tahun dan dibuktikan dengan referensi pekerjaan.
- e. Memiliki pengalaman dalam koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan lintas sektor dalam pengumpulan dan pengolahan data dan dibuktikan dengan referensi pekerjaan.
- f. Menguasai teknik dan metodologi untuk pengolahan data menggunakan SPSS atau Stata serta visualisasi data dan dapat dibuktikan dengan sertifikat/sejenis atau dokumentasi hasil pekerjaan.
- g. Memiliki pengalaman dalam menyusun laporan/rekomendasi hasil analisis atau policy brief dan dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
- h. Diutamakan memiliki pengalaman dalam analisis data kesehatan dan atau gizi dibuktikan dengan hasil analisis, laporan, dan atau dokumentasi hasil pekerjaan, serta memiliki perhatian terhadap detail dan dibuktikan dengan hasil analisis atau laporan yang pernah dibuat.
- i. Diutamakan yang memiliki pengalaman terkait framework pengelolaan/manajemen data dan dibuktikan dengan referensi kerja.

- j. Diutamakan yang memiliki pengalaman atau terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir

Bagi yang berminat dapat mengirimkan penawaran dengan menuliskan kode : **DS** paling lambat **20 September 2024 pukul 10.00 WIB**, ditujukan kepada :

**POKJA V Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas  
Melalui e-mail : [ulp@bappenas.go.id](mailto:ulp@bappenas.go.id)**

**Jakarta, 6 September 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TENAGA AHLI *DATA SPECIALIST*  
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

**A. Latar Belakang**

Indonesia berhasil menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam upaya penurunan *stunting* dalam kurun hampir satu dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013, *stunting* mengalami perbaikan dari 37,2% menjadi 30,8% pada tahun 2018. Prevalensi *stunting* terus mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 21,6% (SSGI 2022). Meskipun tren penurunan terus terjadi, angka ini masih tergolong tinggi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan oleh *World Health Organisation* (WHO). Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*, dengan target 14% di tahun 2024. Komitmen ini akan terus berlanjut untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Berbagai upaya multidimensi dan lintas sektor dilakukan untuk memenuhi target percepatan penurunan *stunting*. Sejalan dengan upaya percepatan penurunan *stunting*, pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari Bank Dunia sebagai penguatan tata kelola penurunan *stunting*. Dari keberhasilan program pada periode pertama, yang berlangsung dari tahun 2018-2024, maka program INEY akan dilanjutkan pelaksanaannya untuk fase dua yang akan berlangsung pada tahun 2024-2028. Pelaksanaan PforR INEY fase dua akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai dari hibah multidonor *Global Financing Facility* (GFF) dan *Indonesia Human Capital Acceleration* (IHCA).

Pelaksanaan komponen hibah di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 akan difokuskan pada (1) penguatan kapasitas sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional, melalui analisis kinerja anggaran dan pembangunan, perumusan dan sosialisasi laporan

pengeluaran dan tinjauan kinerja semester dan tahunan, perumusan dan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi, perumusan dan uji coba kerangka kerja pemantauan dan evaluasi Perpres 72, *dashboard* untuk pengembangan dan pengelolaan, analisis data; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan regional, melalui penyusunan rencana aksi dan adaptasi iklim untuk fortifikasi gizi dan pangan, pedoman perencanaan nasional dan daerah; (3) penguatan kualitas sistem pelaporan dana alokasi khusus untuk penurunan *stunting*; (4) pengembangan program pengetahuan dan produk pembelajaran yang terintegrasi untuk direplikasi.

Sebagai dukungan dalam penguatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* serta peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Perpres 72 terkait penyusunan metadata *stunting*, koordinasi untuk penyepakatan satu data, dan analisis data, dibutuhkan dukungan tenaga ahli.

## **B. Tujuan**

Posisi ini bertanggung jawab untuk mendukung fungsi Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* dalam menyusun metadata *stunting* dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait penyepakatan satu data *stunting*.

## **C. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk pengumpulan data, pengolahan data, dan konfirmasi data yang diperlukan sampai tingkat rumah tangga;
2. Melakukan finalisasi pemutakhiran konsep satu data;
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data untuk menyusun referensi data *stunting*;
4. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk *mainstreaming* isu satu data dan pemanfaatan satu data;
5. Melakukan pengawalan dan pendampingan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi satu data;
6. Bekerja sama dengan tenaga ahli lain terkait dengan pemanfaatan metadata dalam kerangka pemantauan dan evaluasi;
7. Bekerja sama dengan tenaga ahli lain terkait pengembangan *dashboard* sistem monev untuk menyusun kerangka pikir dan alur sistem; serta

8. Penugasan lain yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

#### **D. Keluaran**

1. Pedoman satu data *stunting*.
2. Diseminasi metadata *stunting*.
3. Rekomendasi kebijakan satu data *stunting* dan fasilitasi koordinasi lintas K/L di berbagai tingkat.
4. Laporan koordinasi dengan Satu Data Indonesia untuk menyepakati konsep satu data.
5. Peta jalan pemanfaatan metadata *stunting* dalam pedoman monitoring dan evaluasi.
6. Rancangan pengembangan metadata dalam dashboard serta pemanfaatannya.
7. Pedoman pendampingan metadata ke pemerintah pusat dan daerah.
8. Laporan hasil pendampingan metadata.
9. Penugasan lain yang diminta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

#### **E. Syarat dan Kualifikasi**

##### **Persyaratan**

1. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultan, meliputi:
  - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
  - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
2. Memiliki pengalaman dalam menganalisis indikator program minimal 5 tahun dan dibuktikan dengan referensi pekerjaan.

3. Memiliki pengalaman dalam penyusunan metadata program minimal 1 kali dalam 5 tahun dan dibuktikan dengan referensi pekerjaan.
4. Memiliki pengalaman dalam koordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, dan lintas sektor dalam pengumpulan dan pengolahan data dan dibuktikan dengan referensi pekerjaan.
5. Menguasai teknik dan metodologi untuk pengolahan data menggunakan SPSS atau Stata serta visualisasi data dan dapat dibuktikan dengan sertifikat/sejenis atau dokumentasi hasil pekerjaan.
6. Memiliki pengalaman dalam menyusun laporan/rekomendasi hasil analisis atau policy brief dan dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
7. Diutamakan memiliki pengalaman dalam analisis data kesehatan dan atau gizi dibuktikan dengan hasil analisis, laporan, dan atau dokumentasi hasil pekerjaan, serta memiliki perhatian terhadap detail dan dibuktikan dengan hasil analisis atau laporan yang pernah dibuat.
8. Diutamakan yang memiliki pengalaman terkait *framework* pengelolaan/manajemen data dan dibuktikan dengan referensi kerja.
9. Diutamakan yang memiliki pengalaman atau terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir.

### **Pendidikan**

Minimal lulusan sarjana (S1) diutamakan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, kebijakan, sosial, ekonomi, statistik, ilmu komputer, dan manajemen.

### **F. Lokasi Kegiatan**

Kementerian PPN/Bappenas c.q Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Jalan Taman Suropati 2, Menteng, Jakarta Pusat.

### **G. Pelaporan**

Tenaga ahli diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi hasil *desk review*, desain dan metode penilaian kinerja, hasil pertemuan koordinasi, hasil analisis, rumusan rekomendasi, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan

selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga ahli juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal dan akhir dengan rincian sebagai berikut. Laporan awal dan akhir dapat berubah sesuai *output* yang disepakati.

Tahun	Output
2024	Laporan awal mencakup rencana kerja dan rancangan desain dan metode penyusunan metode, konsep dan rencana penyusunan metadata, koordinasi lintas sektor, konsep integrasi metadata dan pedoman monev, dan rekomendasi kebijakan satu data, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil mencakup dokumen metadata dan narasi kebijakan satu data, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2025	Laporan awal mencakup rencana kerja, rencana konsep implementasi satu data dalam <i>dashboard monev</i> , dan konsep pedoman pendampingan pemanfaatan metadata di daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir pedoman pemanfaatan metadata, visualisasi dan integrasi metadata dalam dashboard monev stunting, hasil uji coba pendampingan pemanfaatan metadata paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2026	Laporan awal mencakup rencana kerja, pemetaan daerah yang akan dilakukan pendampingan, <i>update</i> visualisasi metadata dalam <i>dashboard</i> , rencana kerja koordinasi lintas sektor untuk penguatan data <i>stunting</i> , (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil pendampingan, laporan koordinasi lintas sektor, dan hasil <i>update</i> visualisasi metadata di dalam <i>dashboard</i> , paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2027	Laporan awal mencakup rencana kerja, pemetaan daerah yang akan dilakukan pendampingan, <i>update</i> visualisasi metadata dalam <i>dashboard</i> , rencana kerja koordinasi lintas sektor untuk penguatan data <i>stunting</i> , (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil pendampingan tahap kedua, laporan koordinasi lintas sektor, dan hasil <i>update</i> visualisasi metadata di dalam <i>dashboard</i> , paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2028	Laporan awal mencakup rencana kerja, pemetaan daerah yang akan dilakukan pendampingan, <i>update</i> visualisasi metadata dalam <i>dashboard</i> , dan konsep penyusunan rekomendasi kebijakan (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir laporan pendampingan tahap ketiga, hasil analisis pendampingan, rekomendasi kebijakan terkait data <i>stunting</i> , paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.

## **H. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Satker Kementerian PPN/Bappenas.

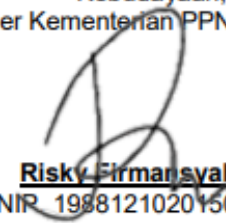




	pemanfaatan metadata dalam pemantauan dan evaluasi.																
9.	Penugasan yang diberikan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat																

Jakarta, 07 Agustus 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V  
 Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan  
 Kebudayaan,  
 Satker Kementerian PPN/Bappenas



**Risky Firmansyah, SE**  
 NIP. 198812102015031003